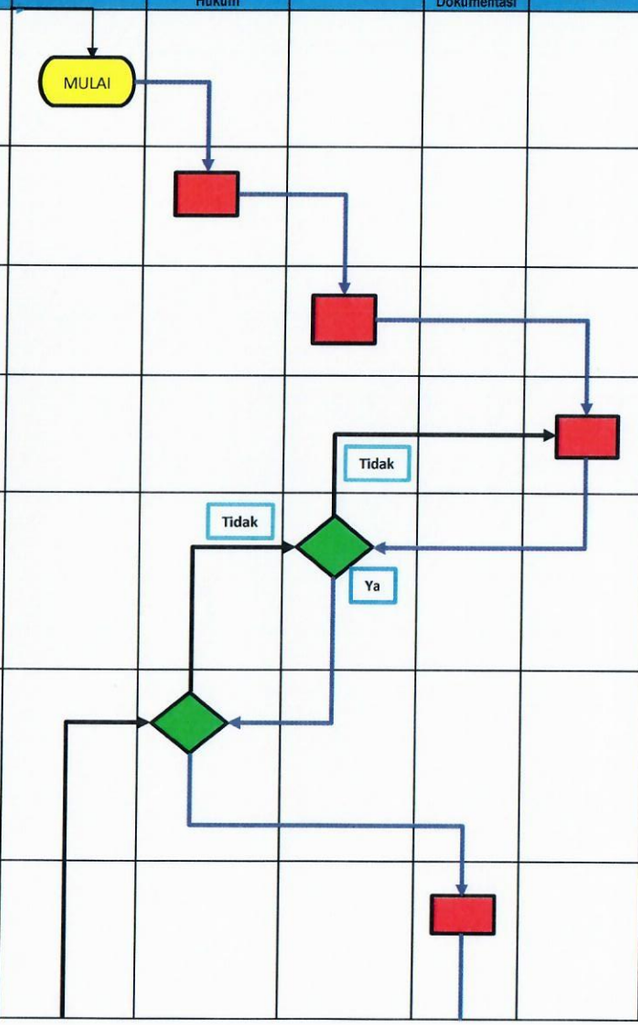
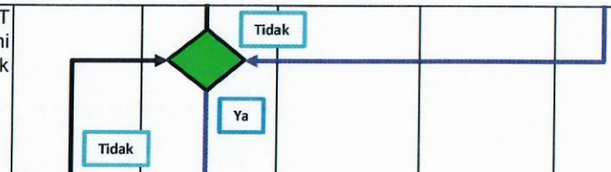
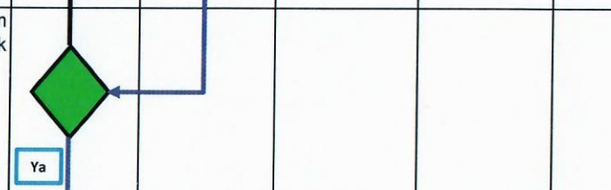
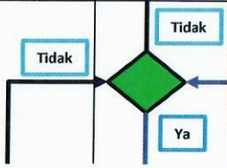
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM SEKSI PERSEROAN TERBATAS	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2942
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubangan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas; 2. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas; 3. Menguasi tupoksi Subdit Badan Hukum.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Peminjaman Berkas; 2. SOP Tata Usaha Pimpinan; 3. SOP Tata Usaha Direktorat Perdata; 4. SOP Dokumentasi Badan Hukum.	1. Komputer; 2. Jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Printer.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pelaksanaan Pemblokiran Perseroan Terbatas harus memperhatiakn ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Disimpan dalam arsip

Flowchart SOP Pelayanan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit Badan Hukum	Kasi PT	Kasi Dokumentasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membaca, Mempelajari dan mendisposisikan permohonan pemblokiran PT		MULAI					Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	1 hari	Disposisi	Berkas permohonan lengkap (dalam hal tertentu Menteri dapat menyetujui atau menolak pemblokiran langsung diluar ketentuan di dalam SOP ini)
2	Memeriksa, mempelajari dan mendisposisikan permohonan pemblokiran PT							Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	1 hari	Disposisi	
3	Memeriksa, mempelajari, memberi petunjuk serta memberikan disposisi permohonan pemblokiran PT							Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	1 hari	Disposisi	
4	Memeriksa, meneliti kelengkapan dokumen dan membuat konsep Nota Dinas terkait pemblokiran PT berdasarkan rekomendasi dan petunjuk Kasi PT untuk mendapat persetujuan							Berkas Permohonan yang sudah didisposisi	4 hari	Konsep Nota Dinas terkait rekomendasi pemblokiran PT	Koordinasi dengan SOP Dokumentasi terkait dengan pencarian data
5	Memeriksa, meneliti dan mempelajari konsep Nota Dinas terkait rekomendasi permohonan pemblokiran PT, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki							Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi terkait Pemblokiran PT	1 hari	Konsep Nota Dinas terkait rekomendasi pemblokiran PT	
6	Memeriksa, meneliti dan mempelajari konsep Nota Dinas terkait rekomendasi permohonan pemblokiran PT serta membubuhi paraf pada Nota Dinas, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki							Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi terkait Pemblokiran PT	1 hari	Konsep Nota Dinas terkait rekomendasi pemblokiran PT	
7	Mencatat konsep Nota Dinas terkait Pemblokiran/ Penolakan Pemblokiran PT							Buku register pencatatan	2 jam	Konsep Nota Dinas terkait rekomendasi pemblokiran PT yang sudah diregister	



8	Memeriksa dan mempelajari konsep Nota Dinas Permohonan Blokir PT terkait rekomendasi permohonan pemblokiran PT serta mendatangani konsep Nota Dinas, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi terkait Pemblokiran PT	2 hari	Hasil telaahan dan rekomendasi	
9	Memberikan persetujuan/penolakan terhadap Nota Dinas Permohonan Pemblokiran PT, jika tidak/ disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		Disposisi Hasil telaahan dan rekomendasi persetujuan/penolakan pemblokiran PT	5 hari	Disposisi Hasil telaahan dan rekomendasi persetujuan/penolakan pemblokiran PT	SOP Penandatanganan dokumen
10	Memberikan disposisi persetujuan/penolakan pemblokiran PT		Disposisi persetujuan/penolakan pemblokiran PT	1 hari	Disposisi persetujuan/ penolakan pemblokiran PT	
11	Memberikan disposisi persetujuan/penolakan pemblokiran PT		Disposisi persetujuan /penolakan pemblokiran PT	1 hari	Disposisi persetujuan/ penolakan pemblokiran PT	
12	Melakukan pemblokiran PT dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pemblokiran/ Penolakan Pemblokiran PT		Disposisi pemblokiran dari Dirjen	1 hari	Disposisi pemblokiran dari Dirjen	
13	Membuat konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pemblokiran/ Penolakan Pemblokiran PT		Konsep surat jawaban pemberitahuan pemblokiran /penolakan pemblokiran PT	3 hari	Konsep surat jawaban pemberitahuan pemblokiran/penolakan pemblokiran PT	
14	Memeriksa konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pemblokiran PT / Penolakan Pemblokiran PT, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		Konsep surat jawaban pemberitahuan pemblokiran /penolakan pemblokiran PT	4 jam	Konsep surat jawaban pemberitahuan pemblokiran/penolakan pemblokiran PT	

15	Memeriksa dan membubuhkan paraf persetujuan konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pemblokiran/ Penolakan Pemblokiran PT, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki							surat jawaban pemberitahuan pemblokiran /penolakan pemblokiran PT	1 hari	surat jawaban pemberitahuan pemblokiran/penolakan pemblokiran PT	
16	Mencatat konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pemblokiran/ Penolakan Pemblokiran PT							Buku register pencatatan	2 jam	surat jawaban pemberitahuan pemblokiran/penolakan pemblokiran PT	
17	Menandatangani konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pemblokiran/ Penolakan Pemblokiran PT							Surat jawaban pemberitahuan pemblokiran /penolakan pemblokiran PT	1 hari	Surat jawaban pemberitahuan pemblokiran /penolakan pemblokiran PT	1.Tembusan kepada Dirjen AHU sebagai Laporan 2.SOP Tata Usaha

